

RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN MENDALAM BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 11 SMA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN PENTINGNYA MEMPELAJARI

Dalam memahami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, pengenalan terhadap berbagai konsep fundamental dalam ilmu politik dan kenegaraan adalah sebuah keniscayaan. Tiga konsep dasar yang seringkali saling terkait dan menentukan corak suatu negara adalah Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan. Ketiga pilar ini membentuk kerangka dasar bagaimana sebuah entitas politik bernama negara diorganisasikan, dijalankan, dan berinteraksi dengan rakyatnya serta dunia internasional.

Mempelajari ketiga konsep ini bukan sekadar menghafal definisi, melainkan juga menumbuhkan pemahaman yang mendalam mengenai filosofi di baliknya, implikasi praktisnya terhadap kehidupan masyarakat, serta perbandingan antara berbagai model yang ada di dunia. Bagi siswa kelas 11 SMA, pemahaman ini krusial untuk menumbuhkan kesadaran bernegara, menjadi warga negara yang kritis, serta mampu menganalisis isu-isu politik yang berkembang di Indonesia maupun global. Pendidikan Pancasila menempatkan pemahaman ini sebagai landasan untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan Indonesia yang majemuk.

B. KETERKAITAN ANTARA BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Meskipun sering dibahas secara terpisah, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Bentuk negara berkaitan dengan susunan teritorial dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Bentuk pemerintahan lebih fokus pada cara kepala negara diangkat dan dijalankan, serta siapa yang memegang kekuasaan tertinggi. Sementara itu, sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara eksekutif (pelaksana pemerintahan) dan legislatif (pembuat undang-undang), dalam menjalankan roda kekuasaan.

Pemahaman yang komprehensif atas ketiga konsep ini memungkinkan kita untuk melihat sebuah negara secara utuh, tidak hanya dari satu sisi saja. Misalnya, sebuah negara bisa berbentuk kesatuan, namun memiliki bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial. Indonesia adalah contoh nyata dari kombinasi ini, yang akan dibahas lebih lanjut dalam materi ini.

C. BENTUK NEGARA

1. DEFINISI NEGARA DAN BENTUK NEGARA

Negara adalah sebuah organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara memiliki empat unsur pokok: wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

Bentuk negara merujuk pada susunan organisasi negara secara keseluruhan, terutama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (otoritas lokal), serta bagaimana kekuasaan negara didistribusikan secara teritorial. Ini lebih menekankan pada struktur geografis dan administratif dari sebuah negara.

2. KLASIFIKASI BENTUK NEGARA

Secara umum, bentuk negara dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu Negara Kesatuan dan Negara Serikat.

a. NEGARA KESATUAN (UNITARY STATE)

Negara Kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas seluruh wilayah negara, baik dalam urusan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Meskipun seringkali ada pembagian wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten, atau kota, namun pembentukan dan kewenangan daerah tersebut sepenuhnya diatur oleh undang-undang pusat dan dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

✓ CIRI-CIRI NEGARA KESATUAN

1. Kedaulatan tidak terbagi: Kedaulatan negara berada pada satu entitas, yaitu pemerintah pusat.
2. Undang-undang Dasar tunggal: Hanya ada satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh negara.
3. Pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh: Segala urusan pemerintahan, pertahanan, luar negeri, dan keuangan dikendalikan oleh pusat.
4. Pembentukan daerah otonom oleh pusat: Pemerintah daerah dibentuk dan diberi otonomi oleh pemerintah pusat, bukan berdasarkan kedaulatan sendiri.
5. Hanya ada satu warga negara: Setiap individu adalah warga negara dari satu kesatuan negara.

✓ KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN NEGARA KESATUAN

1. KEUNGGULAN

- a. Lebih stabil dan kuat: Konsentrasi kekuasaan di pusat membuat negara lebih stabil dan mampu mengambil keputusan cepat dalam menghadapi krisis.
- b. Kesatuan nasional kuat: Meminimalisir potensi disintegrasi dan memperkuat rasa persatuan bangsa.
- c. Efisiensi dalam administrasi: Kebijakan dapat diseragamkan dan dilaksanakan secara lebih efisien.
- d. Biaya pemerintahan lebih hemat: Tidak perlu ada duplikasi lembaga di tingkat pusat dan daerah yang setara.

2. KELEMAHAN

- a. Potensi otoriter: Konsentrasi kekuasaan dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan atau tirani.
- b. Kurang mengakomodasi keragaman: Daerah dengan karakteristik khusus mungkin merasa kurang terwakili atau kebutuhannya kurang dipahami oleh pusat.
- c. Rentang kendali terlalu luas: Pemerintah pusat mungkin kesulitan mengelola wilayah yang sangat luas dan beragam.
- d. Pembangunan yang tidak merata: Kebijakan pusat bisa jadi kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah, menyebabkan ketimpangan.

✓ CONTOH NEGARA KESATUAN

Indonesia adalah contoh klasik negara kesatuan. Meskipun Indonesia memiliki banyak provinsi dan daerah otonom yang diberikan kewenangan luas (desentralisasi), namun secara konstitusional, kekuasaan tertinggi tetap berada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pemerintah pusat di Jakarta. Negara-negara lain yang menganut bentuk negara kesatuan antara lain Jepang, Perancis, Vietnam, dan Filipina.

b. NEGARA SERIKAT (FEDERATION STATE)

Negara Serikat atau Federasi adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki otonomi luas dan kedaulatan sendiri dalam urusan internalnya. Negara-negara bagian ini bersatu membentuk pemerintahan federal atau pusat yang memiliki kekuasaan terbatas, biasanya hanya dalam urusan-urusan tertentu seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan

mata uang. Kedaulatan pada negara serikat terbagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

✓ CIRI-CIRI NEGARA SERIKAT

1. Kedaulatan terbagi: Terdapat pembagian kedaulatan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.
2. Konstitusi federal dan konstitusi negara bagian: Ada konstitusi federal yang mengatur hubungan antar negara bagian dan pemerintah pusat, serta konstitusi masing-masing negara bagian.
3. Pemerintah federal memiliki kewenangan terbatas: Kewenangan pemerintah federal biasanya diatur secara eksplisit dalam konstitusi federal, sisanya menjadi kewenangan negara bagian.
4. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri: Negara bagian memiliki legislatif, eksekutif, dan yudikatif sendiri.
5. Warga negara dari federasi dan negara bagian: Individu memiliki status kewarganegaraan ganda, yaitu sebagai warga negara federasi dan warga negara dari negara bagian tempat tinggalnya.

✓ KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN NEGARA SERIKAT

1. KEUNGGULAN

- a. Akomodatif terhadap keragaman: Sangat cocok untuk negara dengan wilayah luas, penduduk heterogen, dan keragaman budaya karena memberikan otonomi yang luas kepada setiap negara bagian.
- b. Mencegah pemusatan kekuasaan: Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah mengurangi risiko tirani.
- c. Inovasi kebijakan: Negara bagian dapat bereksperimen dengan kebijakan baru yang mungkin lebih cocok untuk kondisi lokal.
- d. Partisipasi politik lebih tinggi: Warga negara merasa lebih dekat dengan pemerintah daerahnya dan lebih mudah berpartisipasi dalam proses politik.

2. KELEMAHAN

- a. Potensi disintegrasi: Perbedaan kepentingan antar negara bagian dapat memicu konflik atau bahkan upaya pemisahan diri.
- b. Duplikasi lembaga dan biaya tinggi: Adanya dua lapis pemerintahan (federal dan negara bagian) dapat menyebabkan duplikasi dan inefisiensi.

- c. Kesulitan koordinasi: Kebijakan antar negara bagian atau antara negara bagian dan federal bisa jadi tidak sinkron.
- d. Ketidaksetaraan antar negara bagian: Sumber daya dan kualitas pelayanan publik bisa sangat bervariasi antar negara bagian.

✓ CONTOH NEGARA SERIKAT

Amerika Serikat adalah contoh paling terkenal dari negara serikat. Setiap negara bagian (state) di AS memiliki undang-undang, gubernur, dan pengadilan sendiri. Contoh lain termasuk Jerman, Kanada, Australia, India, dan Brasil.

c. KONFEDERASI (CONFEDERATION)

Konfederasi bukanlah bentuk negara dalam pengertian modern, melainkan lebih merupakan bentuk persatuan atau aliansi antar negara-negara berdaulat yang mandiri. Negara-negara anggota konfederasi tetap memegang kedaulatan penuh dan membentuk badan bersama untuk tujuan tertentu (misalnya pertahanan atau ekonomi) tanpa menyerahkan kedaulatan mereka kepada badan tersebut. Keputusan badan konfederasi harus disetujui oleh semua atau sebagian besar negara anggota.

✓ CIRI-CIRI KONFEDERASI

1. Negara anggota berdaulat penuh: Setiap negara anggota mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya.
2. Ikatan longgar: Bentuk persatuan yang sangat longgar dengan tujuan spesifik.
3. Tidak memiliki pemerintah pusat yang kuat: Badan konfederasi tidak memiliki kekuasaan memaksa terhadap negara anggotanya.
4. Anggota dapat menarik diri: Setiap negara anggota bebas untuk menarik diri dari konfederasi.

✓ CONTOH HISTORIS KONFEDERASI

Contoh historis konfederasi antara lain Konfederasi Amerika Serikat pada awal kemerdekaannya (sebelum menjadi federasi) dan Swiss (sebelum menjadi negara federasi modern). Uni Eropa saat ini sering dianggap memiliki beberapa karakteristik konfederasi, meskipun dengan integrasi yang lebih dalam.

D. BENTUK PEMERINTAHAN

1. DEFINISI BENTUK PEMERINTAHAN

Bentuk pemerintahan merujuk pada cara kepala negara diangkat atau ditunjuk, serta bagaimana kekuasaan negara didistribusikan dan dijalankan. Fokusnya adalah pada siapa yang memegang kendali kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan bagaimana ia memperoleh serta menggunakan kekuasaan tersebut.

2. KLASIFIKASI BERDASARKAN JUMLAH PEMEGANG KEKUASAAN (ARISTOTELES)

Filosof Yunani Aristoteles mengklasifikasikan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria: jumlah orang yang berkuasa dan sifat pemerintahannya (baik atau buruk).

a. MONARKI (MONARCHY)

Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang yang disebut raja, ratu, atau kaisar, dan jabatannya bersifat turun-temurun.

✓ CIRI-CIRI MONARKI

1. Kepala negara adalah raja/ratu/kaisar.
2. Jabatan kepala negara diperoleh secara turun-temurun (warisan).
3. Masa jabatan kepala negara seumur hidup.
4. Identifikasi negara seringkali dengan dinasti atau keluarga kerajaan.

✓ JENIS-JENIS MONARKI

1. Monarki Absolut: Raja/ratu memiliki kekuasaan penuh dan tidak terbatas oleh hukum atau konstitusi. Contoh: Arab Saudi, Brunei Darussalam.
2. Monarki Konstitusional: Kekuasaan raja/ratu dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Raja/ratu berkuasa tetapi tidak memerintah secara langsung. Contoh: Jepang, Swedia.
3. Monarki Parlemerter: Raja/ratu hanya menjadi simbol negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen dan perdana menteri. Contoh: Inggris, Malaysia, Thailand.

✓ KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN MONARKI

1. KEUNGGULAN

- a. Stabilitas politik: Pergantian kekuasaan yang jelas (turun-temurun) dapat mengurangi konflik politik.
- b. Simbol persatuan: Monarki dapat menjadi simbol identitas dan persatuan bangsa.
- c. Pengambilan keputusan yang cepat: Terutama pada monarki absolut.

2. KELEMAHAN

- a. Tidak demokratis: Kekuasaan tidak diperoleh melalui pilihan rakyat.
- b. Potensi tirani: Terutama pada monarki absolut, tanpa kontrol kekuasaan.
- c. Kualitas pemimpin tidak terjamin: Pemimpin dipilih berdasarkan garis keturunan, bukan kemampuan.
- d. Tertutup terhadap perubahan: Sistem yang cenderung konservatif.

b. OLIGARKI/ARISTOKRASI (OLIGARCHY/ARISTOCRACY)

Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang, biasanya dari kalangan elit tertentu (misalnya kaum bangsawan, militer, atau orang kaya), bukan oleh rakyat secara keseluruhan. Aristokrasi adalah bentuk oligarki di mana kekuasaan dipegang oleh kaum bangsawan atau orang-orang yang dianggap memiliki kualitas terbaik. Dalam klasifikasi Aristoteles, Aristokrasi adalah bentuk "baik" dari pemerintahan oleh beberapa orang, sedangkan Oligarki adalah bentuk "buruk" atau korupnya.

✓ CIRI-CIRI OLIGARKI/ARISTOKRASI

1. Kekuasaan di tangan kelompok kecil.
2. Kelompok penguasa seringkali memiliki kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Tidak ada mekanisme partisipasi rakyat yang signifikan.

✓ CONTOH

Contoh oligarki dapat ditemukan dalam sejarah, seperti Sparta kuno. Di era modern, meskipun tidak secara eksplisit mengaku oligarki, beberapa negara dapat menunjukkan karakteristik oligarki di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir keluarga atau kelompok tertentu.

c. TIRANI/DIKTATOR (TYRANNY/DICTATORSHIP)

Tirani atau Diktator adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh satu orang atau sekelompok kecil orang secara absolut, tanpa batasan hukum atau konstitusional, dan seringkali melalui penindasan. Diktator biasanya memperoleh kekuasaan melalui kudeta atau kekuatan militer, bukan warisan. Dalam klasifikasi Aristoteles, Tirani adalah bentuk "buruk" dari pemerintahan oleh satu orang (korupsi dari monarki).

✓ CIRI-CIRI TIRANI/DIKTATOR

1. Kekuasaan absolut dan tidak terbatas.
2. Tidak ada atau sangat minim partisipasi rakyat.
3. Penindasan terhadap oposisi dan kebebasan sipil.
4. Penggunaan militer atau kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan.
5. Tidak ada mekanisme hukum yang efektif untuk mengontrol kekuasaan.

✓ CONTOH

Contoh historis termasuk kekuasaan Adolf Hitler di Jerman Nazi, Benito Mussolini di Italia Fasis, atau Joseph Stalin di Uni Soviet. Contoh modern seringkali muncul di negara-negara yang mengalami kudeta militer atau transisi politik yang tidak stabil.

d. DEMOKRASI (DEMOCRACY)

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip utamanya adalah kedaulatan rakyat.

✓ CIRI-CIRI DEMOKRASI

1. Kedaulatan di tangan rakyat.
2. Pemilihan umum yang bebas dan adil.
3. Adanya jaminan hak asasi manusia.
4. Pembagian kekuasaan (trias politika) untuk mencegah tirani.
5. Supremasi hukum.
6. Kebebasan berpendapat dan berserikat.
7. Toleransi terhadap perbedaan pendapat.

✓ JENIS-JENIS DEMOKRASI

1. Demokrasi Langsung: Rakyat secara langsung mengambil keputusan politik tanpa perantara. Ini hanya mungkin diterapkan di komunitas yang sangat kecil. Contoh: Demokrasi di Athena kuno atau referendum di Swiss.
2. Demokrasi Tidak Langsung (Representatif): Rakyat memilih wakil-wakil mereka (misalnya anggota parlemen) untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di negara-negara modern. Contoh: Indonesia, Amerika Serikat, Inggris.

✓ PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

1. Pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat.
2. Pemerintahan konstitusional.
3. Perlindungan hak-hak minoritas.
4. Transparansi dan akuntabilitas.
5. Mekanisme perubahan pemerintahan secara damai.

✓ KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN DEMOKRASI

1. KEUNGGULAN

- a. Legitimasi tinggi: Kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga lebih sah.
- b. Perlindungan hak asasi: Menjamin kebebasan dan hak-hak warga negara.
- c. Stabilitas jangka panjang: Meskipun sering bergejolak, demokrasi cenderung lebih stabil dalam jangka panjang karena mengakomodasi perubahan.
- d. Pembangunan manusia: Mendorong partisipasi dan pengembangan potensi individu.

2. KELEMAHAN

- a. Lambat dalam pengambilan keputusan: Karena melibatkan banyak pihak dan proses.
- b. Potensi tirani mayoritas: Keputusan mayoritas dapat mengabaikan hak-hak minoritas.
- c. Rentang terhadap populisme: Pemimpin dapat memanfaatkan emosi massa untuk meraih kekuasaan.
- d. Biaya politik tinggi: Proses demokrasi (pemilu, kampanye) memerlukan biaya besar.

✓ CONTOH DEMOKRASI

Sebagian besar negara modern menganut demokrasi representatif, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, India, Jerman, dan Kanada.

3. KLASIFIKASI LAIN (REPUBLIK VS MONARKI)

Selain klasifikasi Aristoteles, bentuk pemerintahan juga sering dibedakan berdasarkan cara pengisian jabatan kepala negara, yaitu antara Republik dan Monarki.

a. REPUBLIK

Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil rakyat, untuk masa jabatan tertentu. Kepala negara bukanlah hasil warisan atau turun-temurun.

✓ CIRI-CIRI REPUBLIK

1. Kepala negara dipilih untuk masa jabatan terbatas.
2. Kepala negara dapat berupa presiden (dalam sistem presidensial) atau perdana menteri (dalam sistem parlementer yang republik).
3. Kedaulatan di tangan rakyat.
4. Ada mekanisme pergantian kepemimpinan yang konstitusional.

✓ JENIS-JENIS REPUBLIK

1. Republik Presidensial: Kepala negara adalah presiden yang juga sebagai kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih, dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
2. Republik Parlementer: Kepala negara adalah presiden (seringkali simbolis) yang dipilih oleh parlemen atau badan pemilihan, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.
3. Republik Semipresidensial: Kombinasi keduanya, ada presiden yang dipilih rakyat dan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

✓ CONTOH REPUBLIK

Indonesia, Amerika Serikat, India, Jerman, Prancis.

✓ MONARKI

Monarki, seperti yang telah dibahas sebelumnya, adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara adalah raja/ratu/kaisar yang jabatannya diperoleh secara turun-temurun dan seumur hidup.

E. SISTEM PEMERINTAHAN

1. DEFINISI SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan adalah suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, terutama antara lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen). Ini menentukan bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana akuntabilitas dijalankan.

2. JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN MODERN

a. SISTEM PRESIDENSIAL

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tegas. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat atau melalui lembaga pemilihan, dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

✓ CIRI-CIRI POKOK SISTEM PRESIDENSIAL

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih.
3. Masa jabatan presiden bersifat tetap dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen (kecuali melalui proses impeachment yang sangat sulit).
4. Presiden membentuk kabinet (menteri) yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Parlemen (legislatif) dan presiden (eksekutif) memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mengawasi (checks and balances).

✓ HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Hubungan antara eksekutif (presiden) dan legislatif (parlemen) bersifat saling mengawasi. Parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden, dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Namun, parlemen memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran, membuat undang-undang, dan dapat melakukan impeachment terhadap presiden jika ada pelanggaran hukum berat. Presiden memiliki hak veto atas undang-undang yang disahkan parlemen, dan parlemen dapat menolak veto presiden dengan suara mayoritas tertentu.

✓ KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN SISTEM PRESIDENSIAL

1. KEUNGGULAN

- a. Pemerintahan stabil: Masa jabatan presiden yang tetap memberikan stabilitas politik.
- b. Pengambilan keputusan yang cepat: Presiden memiliki kewenangan penuh atas eksekutif.
- c. Pembagian kekuasaan jelas: Mencegah sentralisasi kekuasaan berlebihan.
- d. Akuntabilitas langsung: Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.

2. KELEMAHAN

- a. Potensi kebuntuan (gridlock): Jika presiden dan mayoritas parlemen berasal dari partai yang berbeda, bisa terjadi kesulitan dalam menjalankan pemerintahan.
- b. Kurang responsif: Presiden bisa kurang responsif terhadap aspirasi parlemen atau rakyat jika merasa posisinya aman.
- c. Potensi otoriter: Konsentrasi kekuasaan pada presiden, jika tidak diimbangi pengawasan kuat, bisa mengarah pada otoritarianisme.

✓ CONTOH SISTEM PRESIDENSIAL

Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Brazil, Korea Selatan.

b. SISTEM PARLEMENTER

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif (pemerintahan) bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen). Kepala negara (biasanya raja/ratu atau presiden simbolis) berbeda dengan kepala pemerintahan (perdana menteri).

✓ CIRI-CIRI POKOK SISTEM PARLEMENTER

1. Kepala negara (raja/presiden) berbeda dengan kepala pemerintahan (perdana menteri).

2. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.
 3. Parlemen memiliki hak untuk menjatuhkan perdana menteri dan kabinetnya melalui mosi tidak percaya.
 4. Perdana menteri memiliki hak untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilihan umum baru.
 5. Anggota kabinet biasanya berasal dari anggota parlemen.
- ✓ HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PARLEMENTER

Hubungan antara eksekutif (kabinet yang dipimpin perdana menteri) dan legislatif (parlemen) bersifat langsung dan saling bergantung. Pemerintah (kabinet) harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen untuk dapat memerintah. Jika kehilangan dukungan ini, pemerintah dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya, perdana menteri dapat meminta kepala negara untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu dini jika terjadi kebuntuan politik.

- ✓ KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN SISTEM PARLEMENTER

1. KEUNGGULAN

- a. Fleksibel dan responsif: Pemerintah lebih responsif terhadap perubahan opini publik dan parlemen.
- b. Lebih adaptif: Perubahan pemerintahan dapat dilakukan lebih mudah jika terjadi krisis politik.
- c. Kerja sama eksekutif dan legislatif: Lebih mudah mencapai konsensus karena kabinet berasal dari mayoritas parlemen.

2. KELEMAHAN

- a. Instabilitas politik: Sering terjadi pergantian pemerintahan karena mosi tidak percaya atau koalisi yang rapuh.
- b. Potensi tirani mayoritas: Partai mayoritas di parlemen bisa mendominasi dan mengabaikan oposisi.
- c. Pemilihan umum yang sering: Dapat memakan biaya dan mengganggu stabilitas.
- d. Kurangnya pembagian kekuasaan yang jelas: Batas antara eksekutif dan legislatif bisa menjadi kabur.

- ✓ CONTOH SISTEM PARLEMENTER

Inggris, Jerman, India, Jepang, Malaysia, Kanada, Australia.

c. SISTEM SEMIPRESIDENSIAL (CAMPURAN)

Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Terdapat presiden yang dipilih oleh rakyat dan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

✓ CIRI-CIRI POKOK SISTEM SEMIPRESIDENSIAL

1. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan substantif (bukan hanya simbolis).
2. Ada seorang perdana menteri yang merupakan kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen.
3. Presiden dapat menunjuk dan memberhentikan perdana menteri (terkadang dengan persetujuan parlemen).
4. Parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri dan kabinetnya melalui mosi tidak percaya.
5. Presiden memiliki wewenang dalam urusan luar negeri dan pertahanan, sementara perdana menteri mengurus urusan domestik.

✓ HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM SEMIPRESIDENSIAL

Hubungan ini bisa sangat kompleks. Presiden memiliki otoritas kuat yang berasal dari mandat rakyat, namun perdana menteri dan kabinetnya harus mempertahankan kepercayaan parlemen. Jika presiden dan mayoritas parlemen berasal dari partai yang sama, presiden cenderung lebih dominan. Namun, jika mereka berasal dari partai yang berbeda (koalisi), bisa terjadi "kohabitasi" di mana presiden dan perdana menteri harus bekerja sama, meskipun dengan perbedaan pandangan.

✓ KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN SISTEM SEMIPRESIDENSIAL

1. KEUNGGULAN

- a. Fleksibilitas: Dapat menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang berbeda.
- b. Pemeriksaan ganda: Adanya dua pusat kekuasaan (presiden dan perdana menteri) dapat menjadi sistem check and balances.
- c. Kepemimpinan yang kuat: Presiden yang dipilih langsung dapat memberikan kepemimpinan yang tegas.

2. KELEMAHAN

- a. Potensi konflik: Hubungan antara presiden dan perdana menteri bisa rentan konflik kekuasaan.
- b. Kebingungan akuntabilitas: Siapa yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan tertentu bisa menjadi tidak jelas.
- c. Instabilitas jika terjadi kohabitasi yang tidak harmonis.

✓ CONTOH SISTEM SEMIPRESIDENSIAL

Perancis, Rusia, Portugal, Mesir.

F. KETERKAITAN ANTARA BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

1. INTERAKSI DAN SALING MEMENGARUHI

Seperti yang telah disebutkan di awal, ketiga konsep ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk konfigurasi unik dalam setiap negara.

Bentuk negara (kesatuan atau serikat) menentukan struktur dasar negara dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Bentuk pemerintahan (monarki atau republik) menentukan siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana ia memperoleh serta menggunakan kekuasaannya.

Sistem pemerintahan (presidensial, parlementer, atau semipresidensial) menentukan bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta mekanisme kerja pemerintahan.

Misalnya, sebuah negara serikat kemungkinan besar akan memilih bentuk republik dengan sistem presidensial atau semipresidensial untuk menjaga otonomi negara-negara bagian, meskipun tidak menutup kemungkinan sistem parlementer. Negara kesatuan dapat memilih monarki atau republik, dengan sistem pemerintahan apa pun.

2. FLEKSIBILITAS DAN ADAPTASI

Tidak ada kombinasi yang secara inheren "terbaik" atau "terburuk". Pilihan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan seringkali merupakan hasil dari sejarah, budaya, kondisi geografis, dan aspirasi politik suatu bangsa. Suatu negara dapat mengubah atau

mengadaptasi sistemnya seiring waktu untuk merespons tantangan baru atau menguatkan demokrasi.

3. KASUS INDONESIA

Indonesia adalah contoh yang menarik dari kombinasi ketiga konsep ini:

- a. Bentuk Negara: Indonesia adalah NEGARA KESATUAN, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Ini berarti kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat, meskipun dengan otonomi daerah yang luas.
- b. Bentuk Pemerintahan: Indonesia adalah REPUBLIK, artinya kepala negara adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu (lima tahun) dan dapat dipilih kembali satu kali.
- c. Sistem Pemerintahan: Indonesia menganut SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden, dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR (parlemen) kecuali melalui proses impeachment yang diatur secara ketat. DPR dan Presiden memiliki hubungan saling mengawasi dan mengimbangi.

Kombinasi ini telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan sejak kemerdekaan, terutama pasca-Reformasi 1998, untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. IMPLIKASI DAN PEMBELAJARAN MENDALAM

A. PENTINGNYA PEMAHAMAN KONSEP

Memahami Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan adalah fondasi bagi setiap warga negara yang sadar politik. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk:

1. Menganalisis berita dan isu politik dengan lebih kritis.
2. Memahami alasan di balik kebijakan pemerintah.
3. Menilai kinerja lembaga-lembaga negara.
4. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem politik kita sendiri.
5. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara secara konstruktif.

B. DINAMIKA PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN

Sistem politik bukanlah entitas statis. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dapat mengalami perubahan seiring dengan

perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, dan dinamika global. Pemahaman yang mendalam akan membantu kita untuk melihat perubahan ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari evolusi politik yang sehat, asalkan dilakukan melalui jalur konstitusional dan demokratis.

C. PERAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK

Sebagai warga negara Indonesia yang menganut bentuk negara kesatuan, republik, dan sistem presidensial, kita memiliki tanggung jawab untuk:

1. Menjunjung tinggi konstitusi dan hukum yang berlaku.
2. Berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
3. Mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik yang konstruktif.
4. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
5. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

III. PENUTUP

Materi mengenai Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan merupakan inti dari Pendidikan Pancasila yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan memahami konsep-konsep ini secara mendalam, siswa tidak hanya akan memperkaya pengetahuan teoritisnya, tetapi juga akan dibekali dengan kemampuan analisis yang relevan untuk menghadapi tantangan kehidupan bernegara di masa depan. Pemahaman ini adalah langkah awal menuju partisipasi politik yang aktif dan konstruktif demi kemajuan bangsa Indonesia.